



## Evaluasi Kinerja Penyuluh dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Lahan Kering

Rizka Dwi Astari<sup>1</sup>, Dwiningtyas Padmaningrum<sup>2\*</sup>, Eksa Rusdiyana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret

### ARTIKEL INFO

Sejarah artikel  
Diterima 15/07/2022  
Diterima dalam bentuk revisi 10/01/2023  
Diterima dan disetujui 17/01/2023  
Tersedia online 16/06/2023

Kata kunci  
Evaluasi  
Kinerja penyuluh  
Lahan kering  
Penyuluhan

### ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah lahan kering memiliki tantangan lebih dibandingkan di area lahan sawah, mengingat karakteristik dan kondisi lahan kering yang membutuhkan perlakuan secara khusus. Pendampingan penyuluh dibutuhkan untuk membantu petani dalam mengelola usaha taninya dan melakukan adaptasi terhadap kondisi kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan. Metode dasar dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan studi kasus. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi sumatif. Penentuan lokasi penelitian dipilih secara *purposive*, informan dipilih secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipatif moderat, serta pencatatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pertanian belum memenuhi seluruh indikator keberhasilan kinerja penyuluh pertanian yang tertuang dalam Permentan No. 91 Tahun 2013. Penyelenggaraan penyuluhan yang ada juga masih ditemui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan baik dari dalam maupun luar kinerja penyuluh yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dan kurang optimalnya kinerja penyuluh. Penyelenggaraan penyuluhan belum terlaksana secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja penyuluh dan meminimalisir permasalahan yang ada.

© 2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

### ABSTRACT

*Implementation of agricultural extension activities in dryland areas has more challenges, considering the characteristics and conditions of dryland that require special treatment. Extension assistance is needed to assist farmers in managing their farming businesses and adapting to drought conditions. This study aims to evaluate the performance and analyze the factors which become obstacles in the implementation of extension. The basic method in this study is a qualitative method with a descriptive analysis approach and case study, while the evaluation model used in this study is a summative evaluation model. The research location is chosen purposively, the informants are selected through purposive and snowball sampling. The data are collected by in-depth interviews, moderate participatory observation, as well as recording and documentation. The data analysis is done through*

*data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions. The validity of the data used is triangulation. The results show that the performance of agricultural instructors fail to meet all the indicators of success of agricultural instructors' performance as stated in the Ministry of Agriculture Regulation No. 91 year 2013. The existing extension services also face several problems, both internally and externally, such as the performance of the extension workers that hinder the implementation of the extension and the performance of the extension workers that are considered to be less than optimal. The implementation of extension has not been conducted optimally, therefore an evaluation is still needed so as to improve the performance of extension workers and minimize the existing problems.*

### PENDAHULUAN

Usaha tani dikawasan lahan kering memiliki karakteristik dan tantangan lebih besar. Menurut [Khalimi & Kusuma \(2018\)](#) sering ditemui beberapa permasalahan pertanian lahan kering, seperti kadar air tanah rendah, limpasan permukaan besar, dan nilai sedimentasi tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produksi pertanian, kualitas air memburuk, dan kekeringan. Menurut [Reviandy \*et al.\* \(2021\)](#), lahan dalam kondisi kekeringan memiliki dampak terhadap kerusakan tanaman, gagal panen, dan penurunan produktivitas hasil pertanian. [Wardani \*et al.\* \(2021\)](#) mengungkapkan kekeringan mengakibatkan perubahan baik dari segi biofisik, maupun dampak sosial ekonomi pada usaha tani milik petani. Adaptasi sangat penting dilakukan oleh petani untuk bertahan di tengah perubahan iklim dan untuk meminimalkan potensi risiko yang terjadi pada usaha tani ([Dewi \*et al.\*, 2021](#)). [Idawati \*et al.\* \(2018\)](#), menjelaskan bahwa petani

harus mampu beradaptasi terhadap kondisi keterbatasan air dalam pengelolaan usaha taninya dengan meningkatkan pengetahuan, serta mengubah sikap dan keterampilan agar petani dapat mempertahankan keberlanjutan usaha taninya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Petani adalah manusia yang memiliki pola pikir dan mengumpulkan pengalamannya dari aktivitas yang ditekuninya. Kemandirian petani, peningkatan kemampuan adaptasi kapasitas diri, keberdayaan, dan kesejahteraan petani dapat dicapai melalui pemberdayaan petani yang dilakukan oleh penyuluh. Pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh dapat mengantarkan petani untuk memperoleh pengalaman-pengalaman dan kemampuan adaptasi yang baru ([Amruddin \*et al.\*, 2021](#)). Penyuluhan memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan keberhasilan pertanian terkait perannya dalam membantu petani mengatasi permasalahan usaha taninya,

transfer teknologi, inovasi, dan informasi kepada petani, semakin banyak informasi yang dimanfaatkan oleh petani maka semakin efektif penyuluhan tersebut. [Rusdiyana \*et al.\* \(2022\)](#) menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya petani dengan berbagai karakteristik dan dinamika di dalamnya. Petani sebagai komponen terbesar masyarakat pedesaan merupakan lapisan masyarakat yang memiliki akses dan tingkat pendidikan terbatas memerlukan upaya dalam peningkatan kemampuan dan kapasitas diri, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan sebagai pendidikan non formal.

Peran penyuluhan tersebut menjadikan kinerja penyuluh perlu mendapat perhatian. Menurut [Harahap \*et al.\* \(2016\)](#) kinerja penyuluh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pendidikan formal penyuluh, masa kerja penyuluh, dan jarak tempat penyuluhan. [Kartasapoetra \(1991\)](#) juga menyebutkan bahwa kinerja penyuluh dipengaruhi oleh metode, media, materi, serta tempat penyuluhan. Kinerja penyuluh pertanian dapat dikategorikan baik apabila penyuluh telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar indikator yang telah ditetapkan.

Tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam indikator kinerja penyuluh pertanian telah ditetapkan dalam Peraturan [Kementerian Pertanian No 91 Tahun 2013](#) yang mengatur perihal indikator evaluasi kinerja penyuluhan pertanian. Tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah sebagai acuan bagi pembina di pusat, provinsi dan kabupaten/kota guna mengetahui kesesuaian antara kinerja penyuluh

pertanian dengan tugas dan fungsinya, melihat sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja penyuluh dan sarana dalam masukan terhadap perbaikan kinerja penyuluh pertanian kedepannya. Evaluasi terhadap kinerja tersebut berisikan beberapa poin diantaranya, yaitu: 1) Persiapan penyuluhan pertanian, yang meliputi: a) pembuatan data potensi wilayah dan agroekosistem, b) pengawalan dan pendampingan dalam menyusun RDKK, c) menyusun program penyuluhan pertanian ditingkat desa dan kecamatan, d) menyusun RKTPP; 2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian, yang terdiri atas: a) melaksanakan desiminasi b) melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian (tatap muka, temu-temu, kursus, dan demonstrasi) di wilayah binaan, c) meningkatkan kemampuan petani terhadap akses informasi, d) memperbaiki kelembagaan petani dari aspek kuantitas dan kualitas, e) meningkatkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kuantitas dan kualitas, f) meningkatkan produktivitas usaha tani; 3) Evaluasi dan pelaporan penyuluh pertanian, terdiri atas: a) melakukan evaluasi, b) menyusun dan memberikan laporan.

Pelaksanaan penyuluhan di Desa Ketos, Paranggupito, Wonogiri, merupakan suatu tantangan bagi penyuluh mengingat lahan pertanian yang dikelola merupakan pertanian lahan kering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonogiri membentuk tiga desa menjadi *destana* (Desa Tangguh Bencana). Desa Ketos termasuk kedalam salah satu *destana* sebagai desa dengan kategori kekeringan prioritas tinggi yang berpengaruh besar terhadap kondisi pertanian.

Kondisi lahan pertanian di Desa Ketos berupa batuan karang yang memerlukan kondisi pengolahan lahan khusus. Pertanian lahan kering dan batuan karang tersebut menyebabkan Desa Ketos menjadi daerah yang rawan terhadap kondisi gagal panen apabila terdapat kesalahan dalam mengelola usaha tani. Petani membutuhkan informasi khusus terkait pengelolaan usaha tani yang sesuai dengan kondisi lahan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian lapang dalam hal adaptasi, terutama terhadap kondisi perubahan iklim yang sekarang tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun, penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh lapang masih seputar informasi pertanian secara umum, belum secara khusus memberikan informasi terkait pengelolaan pertanian lahan kering dan padaa kondisi batuan karang, sehingga masyarakat tani di Desa Ketos kurang bisa mengadopsi informasi tersebut. Selain itu, jumlah penyuluh yang bertugas juga terbatas, sedangkan wilayah cakupan desa binaan cukup banyak dan mencapai lebih dari satu desa binaan. [Irwanto \(2019\)](#) menyebutkan bahwa jumlah penyuluh berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Kondisi optimal yang disarankan agar kinerja berjalan optimal yaitu satu penyuluh untuk satu desa. Permasalahan yang muncul jika kapasitas penyuluh tidak sebanding dengan jumlah desa binaan adalah rendahnya intensitas pendampingan dan pendampingan tidak berjalan secara maksimal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian dan perubahan perilaku petani.

Kinerja penyuluh yang lebih fokus terhadap kegiatan administratif dan pelaksanaan program pemerintah, terkadang informasi yang diberikan ketika penyuluhan kurang sesuai dengan kebutuhan petani juga menjadi salah satu masalah pelaksanaan penyuluhan. Permasalahan penyelenggaraan penyuluhan seringkali muncul akibat ketidaksinergian antara petani, penyuluh, maupun pemangku kebijakan dan dinas terkait. [Harahap \*et al.\* \(2016\)](#) menjelaskan bahwa permasalahan antara petani dengan pertanian, penyuluh dan pemerintah sebagian besar bersifat multikompleks. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk melihat keberhasilan kinerja penyuluh dalam membantu petani dan memenuhi kewajibannya dalam bekerja sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya. Evaluasi juga digunakan untuk memantau sejauh mana masalah yang muncul ketika penyuluhan dilaksanakan yang dapat dilihat dari faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja penyuluh dalam memenuhi standar indikator keberhasilan penyuluhan pertanian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Model evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi sumatif. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* (sengaja) di Desa Ketos, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Informan penelitian ini terdiri dari

ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, penyuluh, petani, dan tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif moderat, serta pencatatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung dengan tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dilakukan menggunakan metode triangulasi sumber dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan merupakan salah satu pendidikan non formal yang dapat membantu petani di Desa Ketos dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mengubah sikap petani dalam mengelola usahanya sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih baik dan mampu mencukupi kebutuhan hidup. Penyuluhan di Desa Ketos menjadi sarana petani untuk berkeluh kesah dan mengutarakan pendapatnya terkait berbagai macam kejadian dan permasalahan yang dialaminya dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Ketos tidak memiliki jadwal yang baku, biasanya penyuluhan disisipkan ketika kelompok tani melakukan kegiatan perkumpulan setiap *selapan* atau 35 hari sekali. Program penyuluhan juga sering disisipkan ketika ada acara rakerdes (rapat kerja desa), pada acara tersebut penyuluh akan menawarkan beberapa program pertanian dan akan

disampaikan kepada petani apabila disetujui. Kegiatan penyuluh hasil dari rakerdes disampaikan kepada ketua kelompok tani dan disosialisasikan secara langsung di balai desa. Penyuluhan di Desa Ketos cenderung diberikan atas inisiatif yang diajukan oleh petani. Kegiatan penyuluhan sering dijumpai memasuki musim tanam atau musim panen.

Kantor pusat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Paranggupito tergabung menjadi satu dengan Balai Inseminasi Kambing dan Sapi, sehingga sering disebut dengan balai gabungan. BPP berada pada wilayah strategis dan mudah dijangkau oleh petani dari setiap desa, namun fasilitas yang disediakan BPP belum memadai bagi penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluh di Paranggupito juga memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Penyuluh di Paranggupito terdiri dari 3 penyuluh laki-laki dan 1 penyuluh perempuan, dimana salah satu penyuluh segera memasuki masa purna tugas. Pembagian kerja yang ada di BPP Paranggupito belum merata dan kurang efektif mengingat terdapat penyuluh yang mengampu lebih dari satu desa binaan dan setiap desa rata-rata memiliki 8-13 dusun dimana setiap dusun masing-masing memiliki satu kelompok tani, dan seorang penyuluh lapang mengampu 10 dusun. Keterbatasan jumlah penyuluh membuat penyuluhan tidak berjalan efektif dan merata. Jarak tempat tinggal penyuluh dengan wilayah kerja yang jauh berpengaruh terhadap frekuensi pelaksanaan penyuluhan.

### **Kinerja Penyuluh Pertanian**

Kinerja penyuluh pertanian secara garis besarnya dapat dilihat pada aspek persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 dijelaskan bahwa terdapat 16 butir indikator yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja penyuluh pertanian. Kinerja penyuluh yang ada di Desa Ketos dalam menjalankan kegiatan penyuluhan tidak semuanya memenuhi berbagai indikator keberhasilan kinerja penyuluhan yang sudah tertuang dalam Permentan No. 91 Tahun 2013. Kinerja penyuluh di Desa Ketos yang terpenuhi sesuai dengan butir indikator keberhasilan kinerja penyuluh tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Persiapan Penyuluhan**

Indikator yang terpenuhi dan terlaksana pada tahap persiapan adalah bagian pemanduan dalam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), penyusunan programa kecamatan, dan membuat RKTTP (Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian). Penyuluh membantu petani dalam menganalisis kebutuhan dan penyusunan proposal kebutuhan petani, terutama pada bagian administratif. Penyusunan administratif pada masa sekarang sudah mengandalkan format ketik, namun kemampuan petani yang terbatas dan masih mengandalkan format dengan tulisan menjadi salah satu kendala dalam pengajuan bantuan kelompok, sehingga penyuluh berperan dalam pengetikan dan merapikan format administratifnya. Penyuluh juga membantu menganalisis kesesuaian

pengajuan bantuan dengan kebutuhan petani, tidak semua pengajuan langsung disetujui oleh penyuluh, jika ada yang tidak sesuai maka penyuluh bertugas untuk melakukan revisi dan menyesuaikan isi RDKK sesuai dengan ketentuan dan syarat pengajuan. Penyuluh juga rutin membuat programa tingkat kecamatan serta RKTTP untuk mempermudah pelaksanaan dan pencapaian tujuan penyuluhan yang sudah ditetapkan, tetapi dalam penyusunan program penyuluh tidak memberikan program khusus untuk wilayah Desa Ketos terutama terkait pengelolaan lahan kering pertanian. Penyuluh membuat program berdasarkan keberjalanan program penyuluhan yang sudah terlaksana dan program yang dibutuhkan petani, serta program dari pemerintah. Program penyuluhan dibuat berdasarkan hasil analisis dan identifikasi masalah oleh penyuluh. Penyuluh mendapatkan laporan-laporan terkait permasalahan usaha tani milik petani di Desa Ketos berdasarkan informasi yang diterima secara langsung dari petani. Informasi tersebut didapatkan dari hasil diskusi maupun laporan dari petani. Informasi yang diterima tersebut selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi, kemudian penyuluh mulai menyusun RKTTP dan programa penyuluhan untuk mempermudah dalam penyusunan daftar materi yang dibutuhkan petani serta mempermudah dalam mencapai tujuan agar tidak terlalu bertolak belakang dengan kebutuhan petani.

#### **Pelaksanaan Penyuluhan**

Indikator pada bagian pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Desa Ketos yang terpenuhi, yaitu kegiatan (1) diseminasi, (2) metode penyuluhan tatap muka secara



berkelompok, (3) meningkatkan kemampuan petani terhadap akses informasi, dan (4) membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi usaha taninya. Pelaksanaan penyuluhan awalnya dijadwalkan rutin dilaksanakan setiap bulannya, berdasarkan RKTP yang terdapat pada Programa Penyuluhan Pertanian 2020, kegiatan penyuluhan rutin dilaksanakan dengan frekuensi 8-9 kali pertemuan setiap bulannya dengan beragam materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan petani. Pada kenyataannya penyuluhan yang dijadwalkan rutin juga belum bisa dilaksanakan dengan berkelanjutan sesuai dengan rencana pada program, penyuluhan hanya diberikan sewaktu-waktu jika petani berinisiatif meminta ataupun ketika penyuluh diharuskan hadir saat pertemuan kelompok.

Diseminasi yang dilakukan oleh penyuluh dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani. Penyuluh biasanya melakukan diseminasi kepada petani menggunakan metode kunjungan/tatap muka secara berkelompok karena terbatasnya waktu yang dimiliki. Penyuluh tidak pernah melakukan demonstrasi ataupun mengadakan program seperti: sekolah lapang, temu karya, maupun kursus yang menunjang peningkatan kemampuan petani dalam mengelola hasil usaha taninya. Penyuluh juga kurang mengambil andil dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan kelompok tani.

### **Evaluasi dan Pelaporan**

Pada penelitian ini tidak ditemui penyuluh yang menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan maupun dampak kegiatan penyuluhan yang mereka lakukan. Kesibukan

penyuluh terhadap kegiatan administratif berdampak pada kinerja penyuluh dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan dampak penyuluhan pertanian belum menjadi bagian integral dari rangkaian penyelenggaraan penyuluhan oleh penyuluh.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 memiliki enam belas indikator untuk menilai kinerja penyuluh pertanian. Tujuh indikator kinerja penyuluh pertanian yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian di Desa Ketos, yaitu: (1) pemanduan dalam penyusunan RDKK, (2) penyusunan programa kecamatan, (3) membuat RKTTP, (4) melaksanakan diseminasi, (5) melaksanakan penyuluhan dengan metode kunjungan secara berkelompok, (6) membantu petani dalam peningkatan hasil produksi, (7) melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha tani. Sembilan indikator lainnya belum bisa dilaksanakan oleh penyuluh pertanian, yaitu (1) membuat peta wilayah dan data potensi wilayah, (2) melaksanakan penyuluhan dengan metode demonstrasi/ SL, (3) melaksanakan penyuluhan dengan metode temu-temu, (4) melaksanakan metode penyuluhan dalam bentuk kursus, (5) menumbuh kebangkan kelompok tani/ gapoktan dari segi kualitas dan kuantitas, (6) meningkatkan kelas kelompok tani, (7) menumbuhkan serta mengembangkan kelembagaan ekonomi (8) melaksanakan evaluasi, dan (9) membuat pelaporan.

## **Faktor Penghambat Kinerja Penyuluh Pertanian**

Pelaksanaan penyuluhan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan rencana yang diharapkan. Perencanaan penyuluhan sudah tersusun rapi pada RKTP yang tercantum di dalam program penyuluhan. Salah satu faktor yang menghambat keberjalanan penyuluhan di Desa Ketos diantaranya adalah kurang optimalnya kinerja penyuluh dalam menjalankan program penyuluhan. Peran dan tugas penyuluh yang berlimpah tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang bekerja, sehingga muncul berbagai masalah penyuluhan yang menjadi penghambat untuk berkembangnya penyuluhan di Desa Ketos. Permasalahan juga timbul dari lingkungan maupun fasilitas penyuluhan yang berdampak pada kinerja penyuluh. Hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Pengetahuan Penyuluh dan Ahli Pertanian Terbatas**

Pengetahuan yang dimiliki penyuluh tidak dapat mencakup semua kebutuhan petani. Penyuluh memiliki kemampuan dan keahlian yang terbatas dalam bidang tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh [Purukan \*et al.\* \(2021\)](#) bahwa ilmu pengetahuan semakin berkembang dan penyuluh tidak memiliki pengetahuan sebanyak itu, pengetahuan penyuluh kurang memadai dan

hanya memiliki setengah dari pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Namun, dibalik keterbatasan tersebut penyuluh tetap dibutuhkan oleh petani, seperti yang diungkapkan oleh [Haryanto & Anwarudin \(2021\)](#), meskipun semakin meningkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi peran penyuluh sebagai penyedia layanan informasi masih relevan dan dibutuhkan petani. Penyuluh meminta bantuan tenaga ahli atau orang yang memiliki kemampuan dibidangnya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membantu petani mencari solusi permasalahan usaha taninya. Salah satu tenaga ahli yang sangat dibutuhkan petani di Desa Ketos yaitu ahli hama penyakit tanaman. OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Pertolongan yang diberikan oleh ahli OPT atau sering disebut ahli PHP (Pengamat Hama dan Penyakit) ini berupa anjuran penggunaan dan takaran jenis obat dalam memberantas OPT yang menyerang, namun pertolongan dan kunjungan yang dilakukan oleh tenaga PHP sangat terbatas karena minimnya sumber daya yang ahli menangani hama penyakit tanaman. Kecamatan Paranggupito memiliki satu ahli PHP, sedangkan terdapat 88 kelompok tani binaan, termasuk 10 kelompok yang berada di Desa Ketos, sehingga tidak semua rata mendapatkan pertolongan langsung dari ahli OPT tersebut.



Tabel 1. Triangulasi Pengetahuan Penyuluh Pertanian

No.	Informan	Hasil
1.	NBS	<i>Kalau penyuluh saja ya tidak sanggup apalagi kan ini jaman semakin berkembang pengetahuan juga makin banyak, kita juga ngga semuanya bisa. Jadinya kadang tanya ke ahli atau formulator, tapi terbatas juga. Tenaga hama ada (PHP), nek PHP itu 1 kecamatan ada 1 orang aja ya itu kerjanya sibuk banget kan harus kesana-kesini dan binaannya banyak apalagi petani ngga sabaran</i>
2.	S	<i>jarang penyuluhan karena ya katanya ahli PPL yang dibidang itu ngga ada,</i>
3.	JS	<i>biasanya kalau ada masalah yang kita belum tahu nanti kita simpan dulu terus tanya ke yang lebih ahli.....</i>

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

**Sumber Daya Manusia yang Bertugas sebagai Penyuluh Kurang Memadai**

Penyuluh di Kecamatan Paranggupito memiliki sumber daya manusia yang terbatas, satu kecamatan hanya memiliki 4 penyuluh, sedangkan di Paranggupito terdapat 8 desa dan disetiap desa memiliki beberapa kelompok tani binaan. Sumber daya manusia yang terbatas menyebabkan pembagian kerja tidak merata. Penyuluh di Kecamatan Paranggupito masing-masing ada yang memegang satu desa dan ada yang memegang tiga desa. Pembagian kerja penyuluh yang tidak merata ini dikarenakan terdapat penyuluh yang sudah memasuki usia untuk purna tugas dan terdapat penyuluh yang menjabat sebagai koordinator dimana koordinator bertanggung jawab terhadap 88 kelompok tani di 8 desa tersebut. Kondisi terbatasnya sumber daya manusia semakin diperburuk dengan adanya penyuluh yang

memutuskan untuk pensiun pada tahun berikutnya, sehingga beban tugas akan dilimpahkan kepada penyuluh yang ada. Terbatasnya sumber daya manusia juga berdampak pada rendahnya tingkat kinerja penyuluh karena tidak dapat membina kelompok tani binaan secara maksimal. Kondisi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh [Pramono et al. \(2017\)](#) bahwa semakin banyak desa binaan akan semakin terbatas seorang penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam rangka mempersiapkan kegiatan penyuluhan. Idealnya satu penyuluh pertanian hanya membina satu desa binaan supaya tersedia waktu yang cukup memadai untuk belajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta mampu membantu petani memperbaiki dan mengatasi masalah usaha taninya.

Tabel 2. Jumlah Binaan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Kecamatan Paranggupito

No	Indikator	PPL 1	PPL 2	PPL 3	PPL 4
1.	Desa Binaan	1	3	3	1
2.	Jumlah Kelompok Tani binaan	8	35	34	11

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

**Pelayanan Informasi Penyuluh Pertanian vs Kebutuhan informasi petani**

Informasi yang diberikan oleh penyuluh merupakan informasi seputar kondisi pertanian secara umum di area persawahan belum memiliki fokus pada area lahan kering dan area

batuan karang. Bantuan yang diberikan berdasarkan informasi dari petani juga belum tepat sasaran karena berbeda dari kebutuhan petani, sehingga kurang adaptif untuk diadopsi di area lahan pertanian di Desa Ketos.

Tabel 3. Triangulasi Pelayanan Penyuluhan dan Kebutuhan Informasi Petani

No.	Informan	Hasil
1.	SG	<i>ya mung bantuan bantuan niku sing kurang tepat sasaran nek ting tanah mriki ya mung mubadzir panene ya luhih sui</i>
2.	SP	<i>Info dr PPL sok mboten sesuai mboten saged nek diterapke ting mriki</i>
3.	SW	<i>Biasane juga materi sing disampekke niku cocoke nggo daerah persawahan tapi disampekke ting lahan kering, dadine nggih mboten cocok</i>

Sumber: Analisis Data primer, 2021

**Faktor Jarak dan Waktu Penyuluhan**

Jarak antara wilayah kerja penyuluh dengan tempat tinggal beberapa penyuluh terbilang cukup jauh. Penyuluh yang berdomisili di Paranggupito terhitung hanya berjumlah satu orang, sedangkan yang lainnya berada diluar kawasan Paranggupito. Jauhnya jarak tempat tinggal dengan wilayah kerja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyuluh jarang menghadiri pertemuan kelompok tani setiap *selapan* sekali dan pada kondisi malam hari. Penyuluh hanya hadir

apabila ada kondisi yang mengharuskan hadir. Penyuluh lebih sering mengadakan konsultasi secara terbuka di balai dan pada jam kerja penyuluh. Permasalahan tersebut seperti yang disampaikan oleh [Sapar & Butami \(2017\)](#) bahwa beban penyuluh semakin bertambah ketika memiliki wilayah binaan yang banyak, terlebih untuk penyuluh yang berdomisili di luar wilayah binaan akan lebih banyak mengeluarkan tenaga, fasilitas, sarana dan prasarana sebagai kegiatan operasional untuk menjalankan penyuluhan.

Tabel 4. Jarak Rumah dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) di Kecamatan Paranggupito (dalam km)

No	Indikator	PPL 1	PPL 2	PPL 3	PPL 4
1.	Wilayah tempat tinggal	Giritontro	Paranggupito	Wuryantoro	Giriwoyo
2.	Jarak WKPP dengan tempat tinggal (km)	14	2,8	44	21

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

Tabel 5. Triangulasi Faktor Jarak dan Waktu Penyuluhan

No.	Informan	Hasil
1.	SG	<i>rata-rata kelompok tani itu pertemuannya malam hari, la PPL masuknya kan pagi sampai siang kalau ndak ada agenda-agenda khusus itu ndak pernah ada pertemuan</i>
2.	JS	<i>Disini kalau pertemuan tiap selapanan malam hari kadang kalau dibutuhkan ya mendampingi tp kalau tidak diperlukan biasanya tidak ikut pertemuan karena sudah malam</i>
3.	N	<i>Kalau pertemuan malam hari jarang ada PPL kasin kalau malam-malam harus datang soalnya rumahnya juga kan ada yang jauh, ya kecuali kalau memang sangat dibutuhkan baru diminta hadir</i>

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

### Usia Kerja Penyuluh

Penyuluh yang menjadi pendamping di Desa Ketos merupakan salah satu penyuluh di Kecamatan Paranggupito yang bertugas menggantikan penyuluh sebelumnya karena bertugas menjadi koordinator penyuluh. Penyuluh lapang tersebut baru satu tahun ini menjadi pendamping di Desa Ketos dan masih belum tahu terlalu banyak mengenal Desa Ketos meski secara umum kondisi pertanian hampir sama dengan desa lain tapi kondisi masyarakat dan karakteristik petani masih belum dipahami dengan baik. Petani di Desa Ketos terkadang jauh lebih memilih penyuluh

lapang yang lama yang telah mendampingi mereka daripada penyuluh lapang baru, sehingga terkadang laporan masalah dari petani di Desa Ketos jatuh kepada penyuluh yang lama, disamping itu petani belum sepenuhnya mempercayai penyuluh yang baru, mereka masih melakukan adaptasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Robbins (1996) dalam Syafruddin et al., (2013) menyatakan bahwa penyuluh pertanian yang memiliki masa kerja yang lama berarti telah banyak berkomunikasi dengan khalayaknya dan jauh lebih memahami kondisi wilayah yang ada.

Tabel 6. Usia Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Kecamatan Paranggupito

No.	Indikator	PPL 1	PPL 2	PPL 3	PPL 4
1.	Usia (th)	56	46	40	57

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

### Dualisme Peran Penyuluh

Penyuluh berada pada dua kepentingan yaitu kepentingan petani dan kepentingan pemerintah. Petani memiliki kepentingan dalam pengembangan usaha taninya guna mencapai kehidupan sejahtera dan usaha tani berkelanjutan. Pemerintah memiliki

kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pangan skala besar, sehingga pemerintah berharap hasil pertanian memiliki tingkat produksi tinggi dengan harga produk pertanian tersebut mampu dijangkau semua kalangan. Penyuluh berada pada posisi dimana antara petani dan pemerintah memiliki kepentingan

yang saling bertentangan. Selama penyuluh berpihak kepada pemerintah, akan timbul konflik kepentingan petani dan pemerintah yang berdampak pada menurunnya kepercayaan petani terhadap penyuluh. Partisipasi petani dalam pembangunan pertanian juga semakin menurun. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat dari Chambers (1993) dalam Prayoga (2018) yang menyatakan

bahwa ketika sudut pandang penyuluhan menjadi *bottom up*, penyuluh kurang mampu beradaptasi, akhirnya penyuluh semakin ditinggalkan petani karena dirasa gagal menyediakan informasi untuk mereka. Pemanfaatan sistem *top down*, menguntungkan penyuluh karena tidak perlu memikirkan rencana penyuluhan, namun berakibat pada kurangnya pengembangan kapasitas diri.

Tabel 7. Triangulasi Dualisme Peran Penyuluh

No.	Informan	Hasil
1.	NBS	<i>Penyuluh ya juga bingung sebenere mbak disatu sisi ya dari atas misal ada program, terus kita lihat kok ngga sesuai tapi tetap harus dilaksanakan ya kadang akhire misal program jalan ya penyuluh juga akhire sing menjalankan</i>
2.	N	<i>Sebenarnya titik temunya yang di desa sini mempertahankan padi slegreng sedangkan dari pemerintah ya tetap seperti itu, PPL juga tidak bisa membantu mendapatkan sertifikasi benih local karena katanya sertifikasi mahal dan ini kondisinya hanya bersifat local untuk sertifikasinya</i>

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

### Pelimpahan Tugas dan Permasalahan kepada Penyuluh

Wilayah yang terdapat di Paranggupito tidak hanya terbatas areal pertanian, namun juga area kehutanan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan diantaranya hewan yang tinggal di hutan memasuki area pertanian petani yang berbatasan dengan hutan. Hewan tersebut memiliki kebiasaan mencari makan di area lahan petani, sehingga banyak petani yang mengeluh terkait rusaknya tanaman pada lahan pertanian mereka dan melimpahkannya kepada penyuluh. Penyuluh beranggapan bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja, harus ada pihak lain yang terlibat seperti dari pihak kehutanan, sehingga mampu mengantisipasi satwa liar merusak areal

pertanian. Masalah lain yang timbul yaitu mengenai distribusi bantuan subsidi pupuk yang terkadang terlambat untuk dikirimkan, sehingga penyuluh diharuskan turun tangan membantu petani dalam melakukan konfirmasi terkait kendala pendistribusian subsidi pupuk. Permasalahan tersebut sesuai yang disampaikan oleh Feder et al., (1999) dalam Mardikanto (2008) bahwa kendala yang dihadapi penyuluh dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah skala dan kompleksitas dari tugas-tugas penyuluh. Permasalahan lainnya yaitu menyangkut ketidakmampuan aparat pemerintah dalam menelusuri masalah-masalah yang dihadapi, dukungan politis, alokasi anggaran, dan akuntabilitas kegiatan penyuluhan.

Tabel 8. Triangulasi Tugas Penyuluh Pertanian

No.	Informan	Hasil
1.	NBS	<i>“Disini dekat dengan hutan kalau ada hewan dari hutan sering merusak lahan pertanian yang dekat hutan terlebih sampai sekarang juga penanganannya belum bisa. Seharusnya pihak kehutanan juga membantu pengendalian.. Masalahnya kompleks tapi yang dikenal hanya pertanian jadi penyuluh juga yang jadi sasaran.”</i>
2.	JS	Trs nanti pas sudah pengajuan missal kok pupuke dereng teko ya sing dadi sasaransing dioyak oyak penyuluhe, padahal kan pengirimane sing ngerti antara kelompok tani dengan pengecer tp yo sing ditekoki penyuluhe,
3.	SW	<i>Kalau missal pupuk belum datang ya kita menghubungi PPL atau ada kesulitan pupuk nanti kita konsul ke PPL</i>

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

### Dana, Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Anggaran dana yang dikelola BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Paranggupito terbatas jumlahnya, begitu juga dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung dapat berdampak pada terhambatnya kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, keberadaan fasilitas seperti kantor yang nyaman, ATK, alat peraga, dan brosur-brosur untuk penyampaian materi mampu berpengaruh terhadap kelancaran proses

penyuluhan (Allen et al., 2015). Kantor BPP memiliki fasilitas kantor yang tidak lengkap dan kurang nyaman, terlebih kondisinya balai juga merupakan balai gabungan dengan balai inseminasi sapi dan kambing. Alat peraga dan alat bantu yang terdapat di balai juga tidak tersedia, seperti *proyektor* maupun *lcd*. Penyuluh juga tidak mencetak materi dalam bentuk brosur maupun bentuk cetak yang lain. Fasilitas bantuan yang diberikan oleh penyuluh kepada petani juga terbatas, sehingga tidak merata ke seluruh petani.

Tabel 9. Triangulasi Dana, Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan paranggupito

No.	Informan	Hasil
1.	JS	<i>“Balainya ya kondisinya seperti ini mbak, fasilitasnya ngga lengkap jadi ya apa adanya aja, ada kantor begini sudah bersyukur. Ini belum ada pengembangan buat balainya. Bantuan kalau kita kasih ke petani juga terbatas tergantung dari daftar petani yang mengajukan daftar masalah terlebih dahulu terus kita bantu seadanya stock.”</i>
2.	SG	bisane langsung ora nggo slebaran

Sumber: Analisis Data Primer, 2021

### Tugas Administratif vs Pendampingan

Terbatasnya jumlah sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan penyuluhan tidak terlaksana secara rutin dan merata, baik itu di kelompok tani binaan maupun di beberapa desa binaan penyuluh. Penyuluh juga terbebani oleh tugas administratif yang tidak ada habisnya. Jumlah desa binaan dan kelompok tani yang banyak juga berdampak pada rangkaian tugas penyuluh yang tidak terlaksana, seperti kegiatan pendampingan rutin petani dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Penyuluh tidak memiliki waktu luang untuk mengadakan evaluasi kepada petani. Mereka biasanya melakukan evaluasi hanya berdasarkan sampel yang mereka temui dan hanya berdasarkan sampel wilayah yang mereka lihat, bukan kondisi petani secara menyeluruh. Kesibukan penyuluh juga terkadang membuat penyuluh lupa terhadap beberapa konsultasi yang

dilakukan oleh petani, sehingga terdapat beberapa petani yang tidak menerima solusi terhadap masalah usaha taninya apabila tidak konsisten mengingatkan penyuluh. Penyuluh juga lebih fokus kepada program yang berjalan secara berkelanjutan, sehingga terkadang apabila ada program yang baru terlaksana penyuluh belum bisa mendampingi secara maksimal, terlebih keadaan petani di Desa Ketos yang kurang berani berspekulasi dalam mengembangkan usaha taninya. Hal tersebut sesuai yang disampaikan [Janis et al. \(2014\)](#) bahwa penyuluh mampu bekerja secara maksimal ketika menghadapi beban kerja yang sesuai kemampuan dan kapasitas, ketika seorang penyuluh harus menangani beberapa pekerjaan sekaligus, atau menangani lebih dari satu wilayah binaan pasti akan merasa sulit untuk memaksimalkan pekerjaannya, penyuluh akan sulit membagi waktu dan tidak fokus pada tugas pokoknya sebagai penyuluh.

Tabel 10. Triangulasi Tugas dan Pendampingan Penyuluh Pertanian

No.	Informan	Hasil
1.	N	Jarang, paling ya PPL lebih sering dikantor
2.	S	PPL kan wong lapangan tapi sekarang lebih banyak nang kantor dan ngedata, mboten onten pendampingan
3.	JS	<i>“Mriki mboten pernah ada evaluasi mbak, mboten onten waktune pun entek nggo nginput data-data, po meneh pas arep labuhan kae mesti rame banget, lho sakniki nginput-nginput data ki sering banget isine tugas administrasi.”</i>
4.	NBS	<i>Kalau di ketos ya belum ada pengembangan yang spesial (khusus) karena ya nek kelompok tani jarang mereka takut berspekulasi dan butuh didampingi terus tapi kan kami tidak bisa seterusnya mendampingi masih ada kelompok yang lain belum sekarang banyak urusan admisitratif</i>

Sumber: Analisis Data Primer, 2021



## KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja penyuluh yang terlaksana di Desa Ketos berdasarkan indikator keberhasilan penyuluhan yang tercantum di dalam Permentan No. 91 Tahun 2013, yaitu: memandu penyusunan RDKK, menyusun program penyuluhan pertanian, membuat RKTTP, melaksanakan desiminasi, melaksanakan kunjungan/tatap muka secara berkelompok, meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi, dan meningkatkan produksi komoditas wilayah. Perencanaan penyuluhan pertanian sudah tercantum didalam RKTP yang terdapat pada program penyuluhan pertanian. Perencanaan tersebut sudah menjelaskan rincian mengenai kegiatan, materi, metode dan teknik, maupun banyaknya jumlah pertemuan, namun dalam pelaksanaannya sering ditemui hambatan-hambatan yang menyebabkan kegiatan penyuluhan tidak berjalan lancar. Berbagai masalah diluar juga menjadi hambatan bagi kinerja penyuluh, sehingga penyuluh tidak bekerja secara optimal. Untuk itu diharapkan kedepannya antara petani/kelompok tani, penyuluh, dan pemerintah saling terbuka terhadap kondisi pertanian yang sedang dialami. Petani diharapkan untuk lebih berinisiatif dalam melaksanakan diskusi dengan sesama petani maupun penyuluh. Penyuluh juga diharapkan dapat lebih fokus dan rutin memberikan penyuluhan kepada petani. pihak pemerintah diharapkan dapat memberikan program maupun bantuan yang sesuai dengan kondisi pertanian lahan kering di Desa Ketos. Diskusi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan

penyuluhan (*stakeholder*) diperlukan untuk memperbaiki penyuluhan dan mengoptimalkan kinerja penyuluh.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Muhamad Rizka Dwi Astari berperan sebagai kontributor utama, sementara Eksa Rusdiyana sebagai kontributor anggota, serta Dwiningtyas Padmaningrum sebagai kontributor anggota dan kontributor korespondensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, H. F., Batubara, M. M., & Iswarini, H. I. (2015). Kendala penyuluh dalam melaksanakan aktivitas penyuluhan pada usahatani kopi di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 4(2), 105-110.
- Amruddin, Harniati, Putri Permatasari, Eksa Rusdiyana, Wahyu Trisnasari, Eka Nur Jannah, Achmad Musyadar, Mochamad Sugiarto, Wasrob Nasruddin, & Tri Ratna Saridewi, V. Z. (2021). *Kelembagaan Agribisnis*. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Dewi, W. P., Lestari, E., Rusdiyana, E., & Setyowati, R. (2021, July). Rain-fed Farmers' Strategy of adapting to climate change. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 824, No. 1, p. 012076). IOP Publishing.
- Harahap, N., Hardjono, W., & Tarigan, K. (2016). Kaji Model Metode Penyuluhan Di Era Berlakunya Asean Economic Community (Aec) Melalui Sistem Penyuluhan Yang Bersinergi, Terintegrasi Dan Berkelanjutan. *Agrica Ekstensia*, 10(1), 11-22.
- Haryanto, Y., & Anwarudin, O. (2021). Analisis Pemenuhan Informasi Teknologi Penyuluh Swadaya di Jawa Barat. *Jurnal Triton*, 12(2), 79-91.
- Idawati, I., Fatchiya, F., & Tjitropranoto, T.

- (2018). Kapasitas adaptasi petani kakao terhadap perubahan iklim. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(1), 178-190.
- Irwanto, I. (2019). Analisis Hubungan Karakteristik dengan Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. *Jurnal AgroSainTa: Widyaiswara Mandiri Membangun Bangsa*, 3(1), 47-54.
- Janis, R. L., Pangemanan, L. R. J., Laoh, O. E. H., & Kumaat, R. M. (2014). Kinerja Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Cocos E Jurnal Unsrat*, 4(4), 1-22.
- Kartasapoetra, G. A. (1991). *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara. Unpublished.
- Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Pedoman Evaluasi Penyuluh Pertanian. Kementan. Jakarta [<http://cybex.pertanian.go.id/xms/files/archieve/files/kp/Permentan%2091-2013%20Evaluasi%20Kinerja%20Penyuluh%20Pertanian.pdf> diakses pada 29 Maret 2022].
- Khalimi, F., & Kusuma, Z. (2018). Analisis Ketersediaan Air pada Pertanian Lahan Kering di Gunungkudul Yogyakarta. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 5(1), 721-725.
- Mardikanto, T. (2008). *Refleksi dan Rekomendasi Implementasi Penyuluhan Pembangunan Pertanian dalam Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Pramono, H., Fatchiya, A., & Sadono, D. (2017). Kompetensi penyuluh tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian di kabupaten Garut, Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(2), 194-209.
- Prayoga, K. (2018). Dampak Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 11(1), 46-59.
- Purukan, B. N., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2), 1-10.
- Reviandy, O. P., Rusdiyana, E., & Rinanto, Y. (2021, November). The role of farmer groups in the development of dryland farming in Ketos Village, Paranggupito Subdistrict, Wonogiri Regency. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 905, No. 1, p. 012127). IOP Publishing.
- Rusdiyana, E., Zaman, N., Permatasari, P., Zain, K. M., Suryanti, R., Sugiarto, M., Anwarudin, O., Amruddin, Effendy L., Gandasari, D., & Setiawan, R. B. (2022). *Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Yayasan Kita Menulis.
- Sapar, S., & Butami, L. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan Produktivitas Kakao di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1).
- Syafruddin, H. SS, & Wastutiningsih, SP (2013). Kinerja Penyuluh Pertanian Berdasarkan Faktor Personal dan Situasional. *Jurnal Psikologi*, 40(2), 240-257.
- Wardani, R. I. K., Rusdiyana, E., & Rinanto, Y. (2021, July). Farmers' adaptation in dealing with limited water (A case study on Wonogiri Regency). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 824, No. 1, p. 012077). IOP Publishing.